

Makan Bergizi Gratis di Balikpapan Ditunda

Pemerintah Evaluasi Menu, Susu Tidak Harus Ada, Bisa Diganti Tahu-Tempe



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

Kualitas makanan yang diberikan kepada siswa dalam program makan bergizi gratis menuai sorotan agar sesuai standar kesehatan. Salah satunya belum adanya susu seperti yang selama ini di gaungkan.

BALIKPAPAN - Belum semua daerah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto termasuk di Balikpapan. Kaltim masih menunggu keputusan teknis pelaksanaan program unggulan pemerintah pusat itu yang dikoordinir Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami besok (hari ini) mau rapat soal implementasi pelaksanaan bersama BGN dan pihak-pihak terkait," kata Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik kepada Kaltim Post, Selasa (7/1).

Dia menuturkan Disdikbud Balikpapan hanya sebagai penerima manfaat dari rapat tersebut, lanjut dia, nantinya ada keputusan pasti kapan realisasi program MBG berjalan di Balikpapan.

Termasuk aturan teknis lainnya seperti jumlah penerima manfaat dan sekolah yang menjadi sasaran tahap awal. "Informasi awal dari BGN sudah ada tiga UMKM catering yang ditunjuk sebagai penyelenggara pembuatan MBG," tuturnya. Namun Irfan belum mengetahui UMKM yang terpilih itu dan bagaimana proses seleksinya. Sebab semua proses penyelenggaraan dilakukan BGN. "Sedangkan soal anggaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan," imbuhnya.

Dia menegaskan Disdikbud hanya menyiapkan data sekolah dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Belum diketahui ada berapa sekolah yang bisa mendapat bantuan terlebih dulu. "Kami siap semua untuk sekolah karena sarannya dari awal memang untuk siswa TK hingga SMA. Jadi kami sudah siapkan data," bebernya.

Meski begitu tergantung nanti keputusan sekolah mana yang ditetapkan berdasarkan rapat. Irfan berharap seluruh sekolah di Balikpapan mendapat program MBG. Selain Disdikbud, instansi pemerintah daerah lain juga akan dilibatkan sesuai tugas masing-masing seperti Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan yang akan melihat standar gizi dari menu MBG. "Lalu Dinas Lingkungan Hidup yang menangani paska makan," bebernya.

Untuk diketahui pelaksanaan MBG di Balikpapan rencananya dilaksanakan di SMP 5 dan SMK 1 mulai 6 Januari. Tetapi akhirnya ditunda karena masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan beberapa pihak. "Agar persiapan lebih matang maka pelaksanaan makan siang gratis ditunda minggu depan. *Inshaallah* 13 Januari," kata Plt Kepala SMP 5 Balikpapan Sriwati didampingi guru Aniatul Zakiyah kemarin.

Dia menambahkan keputusan tersebut bersumber dari BGN selaku penyelenggara program MBG. Pihaknya menerima informasi penundaan uji coba MBG menjadi 13 Januari pada Jumat (3/1) lalu. Sebelumnya pihak sekolah melakukan persiapan dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh guru dan tenaga kependidikan tentang persiapan teknis.

"Ternyata tidak berselang lama ada info dari BGN uji coba harus ditunda dulu," bebernya. Dia menjelaskan uji coba MBG memiliki sasaran sebanyak 3.500 peserta didik. SMP 5 dan SMK 1 memenuhi kuota tersebut sehingga kedua sekolah yang dipilih dulu untuk program makan siang gratis tersebut.

"Namun kepastian bagaimana realisasi program nanti dari BGN yang menentukan," tuturnya. Pihaknya hanya menerima informasi awal sebagai salah satu sasaran penerima manfaat MBG di Balikpapan. "Mereka (BGN) juga tadi sudah datang ke sekolah ini menyampaikan surat tugas kemudian menjelaskan sedikit tentang teknis pelaksanaan MBG," tuturnya.

Sriwati membeberkan penyediaan menu MBG berasal dari catering atau vendor yang ditunjuk BGN. Sedangkan sekolah hanya mendistribusikan menu makan siang ini kepada siswa sebagai penerima manfaat. Lalu sekolah juga mendukung dengan ketersediaan fasilitas dan mengatur saat teknis pelaksanaan. "Tapi penyediaan menu makanan bukan dari sekolah, semua langsung dari pusat," jelasnya.

Pada bagian lain pemerintah mulai melakukan evaluasi terkait implementasi program MBG. Pemenuhan atau pemilihan menu hingga jam pengantaran jadi fokus evaluasi saat ini. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati mengungkapkan sejak hari pertama sudah ada beberapa masukan terkait implementasi program ini. Masukan itu jadi rujukan bagi BGN untuk melakukan perbaikan ke depan.

"(Masukan) termasuk antara lain pemenuhan atau pemilihan menu, pemilihan bahan makanan, dan jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," ujarnya saat meninjau pelaksanaan program MBG bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di SDN 02 Susukan, Ciracas, Jaktim, kemarin.

Evaluasi ini dilakukan setiap hari. Dari masukan yang ada BGN akan langsung berkoordinasi dengan titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia. "Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah kecukupan gizinya. Angka kecukupan gizi di situ juga harus ada komponen-komponen gizi yang terpenuhi," katanya.

Misalnya untuk siswa PAUD sekitar 300-400 kilokalori sekali makan. Lalu untuk usia SD kelas I hingga kelas IV sekitar 500-600 kilokalori sekali makan. Dengan demikian bisa jadi menu sama tapi porsi berbeda-beda untuk masing-masing jenjang. Kendati begitu dia memastikan

kandungan gizi telah sesuai dengan referensi yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BGN.

Hal itu berkaitan pula dengan menu susu yang hingga hari kedua masih belum tampak disajikan di beberapa daerah. Dia menegaskan susu ini bisa diberikan bisa tidak. Sebab menu ini pun punya bahan pengganti yang lain seperti tempe dan tahu. "Susu ini kandungan utamanya kan protein, vitamin, dan mineral. Jika itu bisa digantikan bahan makanan lain artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi," jelasnya.

Selain itu, menu susu ini berkaitan dengan lokasi. Jika memang lokasi SPPG jauh dari sentra sapi atau sentra susu, boleh diganti dengan menu lain. "Jadi ketersediaan susu jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada yang penting kandungan gizi itu tercukupi," tegasnya.

Adita juga menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Targetnya sampai triwulan pertama 2025 menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat dengan 1.000 titik dapur SPPG.

HARI KEDUA PELAKSANAAN

Di Semarang, Jawa Tengah, hari kedua program MBG di SMAN 4 berjalan lancar. Siswa merasakan menu berbeda dibanding hari pertama. Kemarin menunya berupa telur dadar, tempe goreng, sayur sop, nasi putih, serta buah pepaya dan semangka. Seorang siswa kelas XI, Salsabilla Cahya Hidayah menyatakan porsi yang diberikan dalam MBG sudah cukup. "Tapi kalau cowok-cowok bilang masih kurang sedikit porsinya," kata Ketua OSIS ini, dilansir dari Jawa Pos Radar Semarang.

Mengenai lauk dia merasa rasanya sudah pas. Sedangkan untuk sayurannya terasa agak hambar. Ia menyarankan diberi tambahan garam. Ia juga berharap ada tambahan susu seperti program yang selama ini digaungkan. "Masih ada yang kurang 4 sehat saja, 5 sempurna nggak ada, nggak ada susu. Ke depan harapannya ada susunya," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan program MBG ini sangat penting karena menyasar langsung anak-anak sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Target sasaran langsung pada pihak-pihak yang berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Di samping itu, turut diedukasi juga bagaimana orangtua bisa memahami pola asuh dan menerapkannya," ungkapnya. Selain itu, diharapkan program ini berdampak positif pada lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendorong penggunaan bahan baku makanan dari masyarakat sekitar. Dengan begitu angka kemiskinan bisa ditekan melalui efek lebih lanjut dari program MBG. (jpg/gel/riz)

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Makan Bergizi Gratis di Balikpapan Ditunda, Pemerintah Evaluasi Menu, Susu Tidak Ada, Bisa Diganti Tahu-Tempe, 08/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.